

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Asri Nurhamidah¹, Yuli Chomsatu S²

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta, mf.manarulhikam@gmail.com

² Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta, you.lichoms@gmail.com

Intisari:

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data sekunder. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 29 Kabupaten dan 9 Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Data yang dikumpulkan adalah Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 yang diambil dari website kemenkeu.go.id. Kemudian data dio;ah menggunakan aplikasi SPSS 25 dan dianalisis melalui model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara statistik berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Temuan ini merefleksikan adanya kewajaran dalam struktur pengelolaan keuangan daerah, di mana penguatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah terbukti menjadi determinan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Belanja modal akan menjadi salah satu determinan yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, jika digunakan tepat sasaran sehingga dapat menghasilkan asset yang dapat mendukung suatu daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya. Namun jika Belanja Modal tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal maka belanja modal tidak akan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Kata kunci:

Pengaruh; Belanja Modal; Pendapatan Asli Daerah; Kinerja Keuangan; Pemerintah Daerah

Abstract:

This study aims to explore and analyze the influence of Local Original Income (PAD) and capital expenditure on the financial performance of the Regional Government in Regencies/Cities in East Java Province for the period 2023. This study uses a quantitative method, with secondary data. The population and sample in this study were 29 Regencies and 9 Cities in the East Java Province. The data collected was the Realization of the 2023 Fiscal Year APBD taken from the website kemenkeu.go.id. Then the data was processed using the SPSS 25 application and analyzed through a multiple linear regression model. The results of this study indicate that Local Original Income (PAD) statistically has an effect on the financial performance of the Regional Government. While Capital Expenditure does not affect the financial performance of the Regional Government. This finding reflects the fairness in the structure of regional financial management, where strengthening the capacity of Local Original Income has been proven to be a determinant of the financial performance of the regional government. Meanwhile, Capital Expenditure will be one of the determinants that influences regional financial performance, if used on target so that it can produce assets that can support a region to increase its Local Original Income. However, if Capital Expenditure cannot be utilized optimally, then Capital Expenditure will not affect Financial Performance.

Keywords:

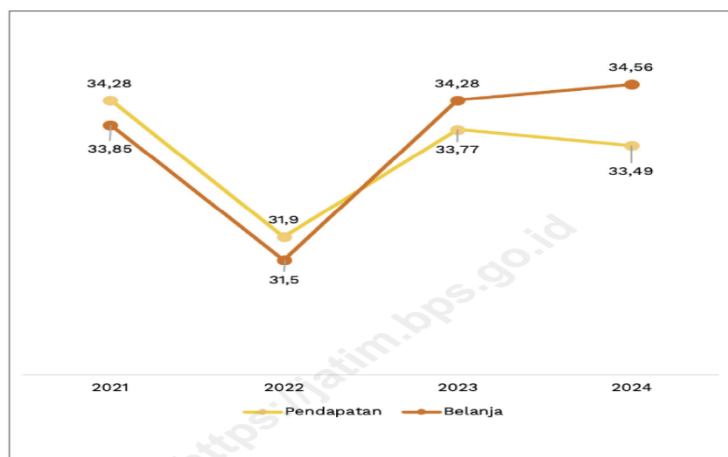
1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban dengan tujuan untuk mengatur dan menjalankan masing-masing pemerintahan sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran pemerintahan Kabupaten/ Kota dalam proses pembangunan di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya. Hal tersebut erat kaitannya dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, bagaimana pemda dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah atau desentralisasi fiskal. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan maka Tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi dan Tingkat desentralisasi fiskal semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa belanja daerah di wilayah tersebut lebih banyak didanai dari Pendapatan Asli Daerahnya.

Pada tahun 2024 total realisasi pendapatan daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 23,7 triliun rupiah (Unaudited), dari pendapatan tersebut komponen terbesar adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah 22,31 triliun rupiah. Sedangkan realisasi belanja tahun 2024 adalah 34,2 triliun rupiah (unaudited). Jumlah Realisasi penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 berjumlah 102,12 triliun rupiah, sedangkan realisasi belanja pengeluarannya sebesar 104,32 triliun rupiah. Dari keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, realisasi penerimaan paling besar dicapai oleh pemerintah Kota Surabaya dengan pendapatan sebesar 9,60 triliun rupiah. Realisasi belanja paling



Sumber/Source: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur/
Regional Financial and Asset Management Agency of Jawa Timur Province

besar juga dicapai oleh pemerintah Kota Surabaya dengan realisasi belanja sebesar 9,54 triliun rupiah. (BPS,2025)

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Addini F & Sri Andriani,2025). Hal itu sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andes Pranita,et.al, yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. (Pranita,et.al, 2024).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faiz Zamzami terkait “*Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia*” menunjukkan hasil bahwa belanja modal memberikan pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Faiz Zamzami & Fuad Rakhman,2023). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Winarsih yang berjudul determinasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Sri Winarsih,et.al, 2023). Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan Alifia Dwi S & Wahyu Pramesti, 2025.

Namun terdapat gap riset pada hasil penelitian tentang pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faiz Zamzami & Fuad Rakhman, menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Faiz Zamzami & Fuad Rakhman,2023). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Addini Fitri & Sri Andriani,2023. Namun hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Novi Natalia & Wendi Suprpto,2023 dan penelitian yang dilakukan oleh Reni Dwi, et.al, 2024 yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yang berada di wilayah Jawa Timur periode tahun 2023. Pengolahan data dilakukan menggunakan software SPSS versi 25. Dalam pengolahan data ditemukan 5 data outlier, sehingga tersisa 33 data yang akan dianalisis menggunakan model regresi linier berganda.

Pengumpulan data sekunder berupa Realisasi APBD periode tahun 2023 yang bersumber dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu di www.kemenkeu.go.id.

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y), dimana kinerja keuangan pada penelitian ini menggunakan *Rasio* Kemandirian. Sedangkan Variabel Independen nya adalah Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Modal (X2). Berikut merupakan definisi masing-masing variabel dan indikator pengukuran yang digunakan :

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Indikator Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. (Resa Novita & Fefri Indra Arza, 2024)	Rasio Kemandirian = $(PAD/Total\ Pendapatan\ Daerah) \times 100\%$
2.	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kesetaraan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu	Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-Lain PAD yang sah

		daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku	
3.	Belanja Modal (X2)	Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 Tahun 2011, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi	Belanja Modal = Belanja tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset tetap lainnya

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda, sehingga persamaan statistic yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 α : Nilai Konstanta
X1 : Pendapatan Asli Daerah
X2 : Belanja Modal
 $\beta_1 - \beta_3$: Koefisien regresi dari masing-masing variable
 ϵ : Variabel lain yang tidak diteliti

3. Hasil dan Diskusi

A. Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	33	169.57	1171.02	429.0254	245.29365
Belanja Modal	33	112.29	549.38	279.6353	109.65205
Kinerja Keuangan	33	11.55	33.78	18.6730	4.89398
Valid N (listwise)	33				

Dari data tersebut diatas dapat di analisis bahwa Kinerja Keuangan memperoleh hasil mean 18,6730; nilai minimum 11,55 dan nilai maximum 33,78 serta nilai standard deviation berada di angka 4,893.

PAD memperoleh hasil mean 429,025; nilai minimum 169,57 dan nilai maximum 1171,02 serta nilai standard deviation berada di angka 245,293

Belanja Modal memperoleh hasil mean 279,33; nilai minimum 112,29 dan nilai maximum 549,29 serta nilai standard deviation berada di angka 109,65.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Variabel	Sig.	Standar	Kesimpulan
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,170	> 0,05	Terdistribusi Normal

Hasil uji normalitas yang tersaji dari table diatas menunjukkan nilai *Asymp. Sig* adalah 0,170 yang berarti telah melebihi standar nilai 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa variable memiliki data yang berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

	<i>Tolerance</i>	Std	VIF	Std	Keterangan
PAD	0,522	> 0,10	1,916	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
BM	0,522	> 0,10	1,916	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada setiap variable lebih dari 0,10 dan nilai VIF pada setiap variable menunjukkan lebih kecil dari 10. Maka dari data yang tersaji diatas dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

	<i>Sig</i>	Std	Keterangan
PAD	0,158	> 0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas
BM	0,187	> 0,05	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan metode *Glejser* dengan pengambilan Keputusan jika nilai probabilitas (*sig*) > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas dan jika nilai probabilitas (*sig*) < 0,05 maka terjadi heterokedastisitas. Hasil perhitungan uji heterokedastisitas pada table yang tersaji diatas menunjukkan tidak ada *p-value* kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi gangguan heterokedastisitas dalam proses estimasi parameter model penduga. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas dalam penelitian ini.

4. Uji Autokorelasi

DW	DL	DU	4-DU	4-DL	Keterangan
1,651	1,3212	1,5770	2,423	2,6788	Tidak terjadi Autokorelasi

Penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* (DW). Hasil pengujian yang tersaji dalam table diatas menunjukkan nilai DW sebesar 1,651. Berdasarkan table Durbin Watson dengan $k=2$ dan $n=33$ maka diperoleh $du=1,5770$ dan $4-du=2,423$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW masuk ke dalam kriteria $du < dw < 4-du$ ($1,5770 < 1,651 < 2,423$) yang berarti model dalam penelitian ini telah terbebas dari autokorelasi.

C. Uji Regresi Linier Berganda

1. Model Regresi

Unstandardized Coefficient B	
(Constanst)	17,521
PAD	0,015
BM	-0,018

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan persamaan berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Berdasarkan hasil yang tersaji dalam table diatas ditulis dengan persamaam :

$$KK = 24,974 + 0,004 PAD - 0,040 BM + \epsilon$$

Interpretasi hasil dan analisis sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 17,521 berarti PAD dan Belanja Modal dalam model diasumsikan bernilai 0 atau konstan maka kinerja keuangan mengalami kenaikan sebesar 17,521.
- Besarnya nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah adalah 0,015 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan PAD, nilai kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,015.
- Besaarnya nilai koefisien Belanja Modal adalah - 0,018 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Belanja Modal maka nilai Kinerja Keuangan akan berkurang sebesar 0,018.

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Keterangan	F Hitung	F Tabel	Sig.	Kriteria	Hasil
Uji Kelayakan model (F)	6,202	> 4,160	0,006	< 0,05	Model Layak

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 6,202. Jika dimasukkan ke dalam kriteria maka F hitung > F table (6,202 > 4,160) dengan Tingkat signifikansi 0,006 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa PAD dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan.

3. Uji Hipotesis (Uji t)

Hipotesis	T Hitung	T Tabel	Sig.	Kriteria	Keterangan
PAD	3,466	>1,696	0,002	< 0,05	Diterima
BM	-1,943	>-1,696	0,062	< 0,05	Ditolak

Berdasarkan hasil Uji Hipotesis (Uji t) pada table diatas, diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,696, maka dapat disimpulkan bahwa :

a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian pada variable Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa t hitung > t-tabel (3,466 > 1,696) dan nilai sig < 0,005 (0,002 < 0,005). Hal ini menunjukkan bahwa menerima H1 dan dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Addini Fitri Fadilah & Sri Andriani tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi. (engaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi,2025)

b. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian pada variable Belanja Modal menunjukkan bahwa t hitung $< t$ -tabel ($-1,943 < -1,696$) dan nilai $sig > 0,005$ ($0,062 > 0,005$). Hal ini menunjukkan bahwa menolak H_2 dan dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dhea Putri P,et.al tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota Pontianak, yang menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian lain tentang Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Reni Dwi A,et.al ,juga menunjukkan hasil yang serupa bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Uji Koefisien Determinasi

<i>Adjusted R Square</i>	Kesimpulan
0,245	Variabel independent berpengaruh sebesar 24,5 terhadap Variabel dependen

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa adjusted R-Square sebesar 24,5% dipengaruhi oleh variable dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 75,5 % dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam variable ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini terbatas pada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang menyajikan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode tahun 2023, serta menggunakan data sekunder yang tersedia di website Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini berfokus pada 2 variabel utama, sehingga factor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya disarankan supaya dapat menambahkan variable penelitian seperti,ukuran daerah, atau dana perimbangan. Selain itu juga disarankan untuk dapat meneliti obyek yang lebih luas dan menambahkan periodenya,seperti Kabupaten/Kota di Indonesia dalam periode 5 tahun terakhir. Hal itu dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. Daftar Pustaka

Andes Pranita,et.al. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 10 Nomor 2, <https://financial.ac.id/index.php/financial> .

- Andriani, A. F. (2025). Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 23 No.1.
- Dhea Putri, et.al. (2024). Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 8 Nomor 4, -.
- Indra, R. N. (2024). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Deepublish.
- Kurniawan, A. (2019). *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis*. Alfabeta.
- Melati Pramudita, et.al. (2024). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Kalimantan Barat. *Jurnal AKuntansi dan Keuangan*.
- Pramesti, A. D. (2025). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 8 Nomor 2.
- Prof. Mardiasmo, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik*. Bpfe Yogyakarta.
- Rakhman, F. Z. (2023). Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. - , <https://creativecommons.org>. doi: DOI: <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148>
- Reni Dwi A, et.al. (2024). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Sri Winarsih Ramadana, e. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7 Nomor 2, -. doi: <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Sujarweni, W. (2025). *Akuntansi Pemerintahan Teori & Aplikasi*. Pustaka Baru Press.
- Suprpto, N. N. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kesetaraan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antar Pemerintah Pusat Dan Daerah.